

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
1	78411 Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
2	78412 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
3	78413 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
4	78414 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
5	78415 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
6	78416 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
7	78417 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
8	78419 Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
9	78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>2. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <p>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</p> <p>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>3. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>4. 4 Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>Sewa bermeterai cukup</p> <p>6. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>		
10	78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Menengah Tinggi	<p>NIB</p> <p>Sertifikat Standar :</p> <p>1. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>PMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) 3. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 4. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</p> <p>6. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>		
11	78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>PMA)</p> <p>2. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <p>c. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</p> <p>d. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>3. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>4. Melampirkan profil lembaga pelatihan</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. struktur organisasi dan uraian tugas h. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur i. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun j. program PBK k. kapasitas latih per tahun l. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</p> <p>6. Surat kerjasama</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>		
12	78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>(Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 4. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>5. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA c) (Untuk Pelaku Usaha PMA) 		
13	78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>(Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 4. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 5. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK 6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA c) (Untuk Pelaku Usaha PMA) 		
14	78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Menengah Tinggi	<p>NIB Sertifikat Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) 2. Surat kerjasama 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</p> <p>4. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <p>a. struktur organisasi dan</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>uraian tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>5. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			terdiri dari: a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA c) (Untuk Pelaku Usaha PMA)		
15	78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 2. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>3. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA c) (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>4. Melampirkan identitas dan riwayat hidup</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>5. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan <p>6. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup		
16	78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya Lainnya Swasta di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar : 1. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) 2. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p> <p>3. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan b) Dokumen Pengesahan RPTKA c) (Untuk Pelaku Usaha PMA) <p>4. Melampirkan identitas dan riwayat hidup</p>		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			<p>penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</p> <p>5. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi dan uraian tugas b) daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c) program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun d) program PBK e) kapasitas latih per tahun f) daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 		

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
			6. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup		
17	78431 Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	Tidak Ada	
18	78432 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	Tidak Ada	
19	78433 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	Tidak Ada	
20	78434 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	

NO	KBLI	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA & PERSYARATAN	PB UMKU & PERSYARATAN	REGULASI
1	2		3	4	6
21	78435 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
22	78436 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	Tidak Ada	
23	78437 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	
24	78439 Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	Rendah	PERSETUJUAN PEMERINTAH	-	